

# UMKM dan Diplomasi Ekonomi Kerakyatan

## Leonard F Hutabarat PhD

Pemerhati Masalah Internasional,  
Alumnus Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris

\*\*\*

### Re-orientasi Diplomasi Ekonomi Indonesia

GR Berridge dan Alan James (2012) menekankan pentingnya upaya untuk memformulasikan dan mengatur kebijakan yang terkait dengan produksi, pergerakan dan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, atau sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional.

Oleh karena itu, peranan diplomasi ekonomi menjadi sangat strategis dalam turut menunjang perekonomian nasional yang tengah berkembang, untuk dapat mengkomodir perkembangan ekonomi global yang tengah berada dalam ketidakpastian. Presiden Jokowi pada saat Rapat Kerja Pimpinan Kemlu dan Kepala Perwakilan RI tahun 2015, menegaskan kembali mesin diplomasi ekonomi diupayakan untuk mendukung pencapaian target ekonomi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi harus mengeksplorasi pasar baru dan peluang bisnis bagi produk Indonesia dan investasi yang sejalan dengan pergeseran worlds economic center of gravity.

Dari sejumlah capaian yang telah diraih politik luar negeri, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu penanganan lebih serius, antara lain: peran masyarakat di pusat dan di daerah serta bagian dari upaya implementasi diplomasi ekonomi, dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Konsep diplomasi ekonomi menegaskan kepentingan ekonomi dan politik saling memperkuat satu sama lain dan berjalan bersamaan (Okano-Heijmans, 2013). Hubungan luar negeri ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional dan untuk mencapai tujuan strategis nasional dengan economic means.

Diplomasi ekonomi sangat memainkan peran yang signifikan. Pertama, memperkuat kepentingan, perpanjangan politik domestik dan mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Kedua, memperkuat pengaruh internasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperkuat upaya diplomasi yang ada. Ketiga, meningkatkan

lingkungan diplomatik yang mendukung situasi kerjasama dan perdamaian. Dan akhirnya, keempat, mencapai peluang ekonomi.

Untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi, Indonesia perlu menentukan strategi secara nasional, regional dan internasional. Kebijakan pemerintah perlu melakukan re-orientasi secara geo-ekonomi dan sektoral. Diplomasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang perlu lebih serius menggarap prospective market dan bukan hanya bertumpu pada pasar tradisional. Indonesia juga perlu menetapkan sektor prioritas yang akan dikembangkan sehingga benar-benar mendukung ekonomi kerakyatan. Sebagai negara maritim dan kepulauan, sektor perikanan dan kelautan sepatutnya menjadi prioritas sektoral. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pangan selanjutnya pula menjadi perhatian penting dalam diplomasi ekonomi, selain sektor UMKM, ekonomi kreatif dan budaya yang menjadi salah satu ujung tombak kekuatan ekonomi nasional.



(AS) sehingga berimplikasi negatif terhadap kurs di EC termasuk Indonesia. Alhasil, pada triwulan II 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 4,67 persen, melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,03 persen, sementara kurs rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi menjadi di atas Rp. 14.280 pada minggu kedua September 2015.

Dengan perkiraan bahwa perekonomian Indonesia melambat sampai akhir tahun, Pemerintah sesungguhnya masih cukup optimis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% atau lebih. Upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia, dapat dicapai melalui akselerasi pengeluaran pemerintah (government spending) dan peningkatan realisasi investasi khususnya investasi asing untuk pembenahan dan pembangunan beberapa infrastruktur nasional.

### Sine Qua Non Tantangan Globalisasi : Diplomasi Ekonomi

Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi global yang menimbulkan tantangan baru yang semakin kompleks. Pembangunan, krisis keuangan global, krisis pangan dan energi merupakan isu internasional yang menjadi tantangan bagi seluruh negara, baik yang maju maupun yang berkembang.

Meskipun dunia diplomasi bergerak dengan cepat sehingga sulit untuk diprediksi dan memiliki aneka nuansa dan semakin kompleks, tantangan bagi diplomasi Indonesia adalah bagaimana mengadopsi kondisi politik luar negeri kita yang bebas dan aktif ke dalam realitas baru abad ke-21 ini. Sistem internasional saat ini tidak lagi terstruktur dan hubungan antar negara telah mengalami perubahan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ke-16 tertinggi di dunia dan ke-3 di Asia, merupakan middle power dengan nilai-nilai universal yang dianutnya serta perannya dalam kepentingan global dan regional. Globalisasi ekonomi mau tidak mau semakin melibatkan Indonesia dengan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi bukan merupakan sebuah alternatif pilihan, namun merupakan sebuah keniscayaan mengingat globalisasi ekonomi akan terus melanda dunia, khususnya Indonesia.

PADA pernyataan pers pertamanya pada 2015, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menguraikan pandangan soal langkah dan tantangan kebijakan luar negeri dan diplomasi RI untuk lima tahun ke depan. Berpedoman pada arahan Presiden bahwa kebijakan luar negeri harus berorientasi kepada rakyat (diplomacy for the people) dan bumi (down-to-earth), Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya diplomasi yang terkoneksi secara konkret dengan kepentingan rakyat. Bagaimana diplomasi pro rakyat yang bukan "elite" diplomacy? Diplomasi yang membumi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional serta mengamankan kepentingan ekonomi strategis lainnya.

Presiden Jokowi telah menempatkan rakyat pada pusat agenda pembangunan yang people-centered policy, termasuk diplomasi dan kebijakan luar negeri. Dengan visi itu Menlu Retno Marsudi telah memprioritaskan diplomasi guna mendukung pencapaian hasil nyata bagi pemangku kepentingan dalam negeri, termasuk bagi petani, nelayan, maupun pengrajin UMKM. Hal ini jelas terlihat dari prioritas diplomasi ekonomi, bahkan Kemlu juga telah membentuk Satgas Penguatan Diplomasi Ekonomi awal tahun 2015 ini. Dalam konteks bilateral, promosi perdagangan, pariwisata dan investasi juga akan lebih mewarnai aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri. Prioritas tersebut sesuai dengan target Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor 300 persen dan peningkatan 20 juta wisatawan asing pada tahun 2019.

Upaya mencapai target diplomasi ekonomi Indonesia akan menemui tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Salah satu tantangan besar saat ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang melambat disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang belum pulih sepenuhnya akibat ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia yang berkelanjutan seperti perlambatan ekonomi di kawasan Eropa, Tiongkok, Jepang dan negara-negara berkekuatan baru (emerging countries/EC). Selain itu, terdapat pula dampak penguatan kurs dolar Amerika Serikat

### BIOFILE

Nama: Leonard F. Hutabarat, Ph.D.  
Jabatan: Plt. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa BPPK, Kementerian Luar Negeri RI.  
Alamat: Gedung BPPK, Eks. BP-7, Lantai 13, Kementerian Luar Negeri RI